



SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERISAAN PERHATIAN KHUSUS

KPU Termasuk Tidak WTP

Penggunaan Anggaran di Lima K/L Belum Klir

JAKARTA - Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Kementerian/Lembaga (K/L) di semester I tahun 2019 masih belum menunjukkan performa yang sempurna. Dari semua K/L yang diaudit, lima di antaranya belum mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Lima itu terbagi dari empat K/L beropini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), salah satunya Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berikutnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian satu yang mendapat opini disclaimer adalah Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja

Djanegara kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (19/9). Moermahadi mengatakan, jumlah WDP dan Disclaimer masih sama dengan tahun 2018 lalu. Namun demikian, jika ditarik lebih jauh sejak 2016, ketertiban saat ini sudah lebih baik.

"Presentasinya juga meningkat, tinggal sedikit yang belum WTP," ujarnya. Sebagai catatan, jumlah WDP di tahun 2016 sebanyak delapan K/L dan Disclaimer sebanyak enam K/L.

Permasalahan di empat K/L yang WDP dan satu K/L Disclaimer beragam. Untuk KPU terkait sisa dana belanja dari Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) Bendahara tahun 2018 tidak dapat diyakininya ketepatan jumlahnya. Lalu Kemenpora, BPK mencatat beberapa belanja barang belum didukung bukti pertanggungjawaban serta terdapat ketidaksesuaian informasi dalam bukti per-

tanggungjawaban.

Sementara Bakamla yang disclaimer memiliki enam catatan dalam audit. Di antaranya pengadaan yang dibayar tidak terealisasi, aset tetap dari alih status Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemananan belum jelas keberadaannya, hingga kelebihan pembayaran belanja modal atas pekerjaan yang tidak ada dalam kontrak.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi mengatakan tren peningkatan kepatuhan dan kedisiplinan sebagai hal yang positif. Namun demikian, masih adanya K/L yang mendapat catatan atau belum WTP tetap harus menjadi perhatian. "Yang paling penting rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan kita tindaklanjuti," ujarnya. Jokowi akan meminta K/L yang belum tuntas untuk meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban anggarannya. (far)